

099131



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

Jl.KRT. Pringgodingrat No.1,Tridadi,Sleman
Sleman - DI Yogyakarta 55551
Telp. 0274868401 Fax. 0274868401



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp/Faks: (0274) 868401, pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

N o m o r : 1543 /SEK.PN.W13.U2./KU2.1/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan dan CALK
Semester I TA 2025 Satker Pengadilan Negeri
Sleman (099131)

Sleman, ²⁵ Juli 2025


**Kepala KPPN Yogyakarta
di Yogyakarta**

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami sampaikan Laporan Keuangan dan Catatan
atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 satuan kerja Pengadilan
Negeri Sleman kode satker 099131.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran


YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP.197908222005022001

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025



Jl.KRT. Pringgodiningrat No.1,Tridadi,Sleman

Sleman - DI Yogyakarta 55551

Telp. 0274868401 Fax. 0274868401



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.KRT. Pringgodingrat No.1,beran,Sleman

Telp. 0274868401 Fax. 0274868401

Sleman - DI Yogyakarta 55551

e-mail : pnsleman@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sleman adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sleman. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sleman, 25 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK
NIP. 197908222005022001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	6
Pernyataan Telah Direviu.....	8
Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman	8
Semester I Tahun 2025	8
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Dasar Hukum.....	21
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sleman.....	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran	24
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Pendapatan	32
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	36
ASET	36
C.1. Aset Lancar.....	36
KEWAJIBAN	39
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	39

C.6. Ekuitas	40
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	41
D.2. Beban Persediaan	42
D.3. Beban Barang dan Jasa	43
D.4. Beban Perjalanan Dinas	44
D.5. Kegiatan Non Operasional	45
D.6. Pos Luar Biasa	45
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	46
E.1. Ekuitas Awal	46
E.2. Surplus (defisit) LO	46
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset	46
E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan.....	46
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	46
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	47
E.3. 5 Koreksi Lain-lain	47
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	47
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	48
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	48
E.5. Ekuitas Akhir.....	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	49
F.2. Pengungkapan Lain-lain	49
Laporan-laporan Pendukung.....	60
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	61
Daftar Hibah Langsung.....	63

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2025.....	32
Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2025 dan 2024	33
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025	34
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024	34
Tabel 5 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	35
Tabel 6 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	36
Tabel 7 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	36
Tabel 8 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas.....	38
Tabel 9 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan 31 Desember 2024	38
Tabel 10. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	39
Tabel 11 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	40
Tabel 12 Rincian PNBP per 30 Juni TA 2025 dan 30 Juni 2024.....	41
Tabel 13 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024	42
Tabel 14 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	43
Tabel 15 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024	44
Tabel 16 Rincian Kegiatan Non Operasional	45

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman Semester I TA. 2025 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pengadilan Negeri Sleman.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Sleman, 25 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,


YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK.
NIP. 197908222005022001

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Sleman

Jl.KRT.Pringgodiningrat no.1,beran,Sleman Sleman - DI Yogyakarta 55551

Telp. 0274868401 Fax. 0274868401 e-mail : pnsleman@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sleman, 25 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK
NIP. 197908222005022001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Semester I TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 80,873,500 atau mencapai 37.14 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 217,762,000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp. 95,018,180 atau mencapai 31.65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 300,237,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3,074,914,374, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 3,074,914,374; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 3,085,020,724 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 3,085,020,724 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar (10,106,350).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.80,873,500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 113,807,135 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.32,933,635). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar (Rp.0) dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp.32,933,635).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 5,019,550 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp.32,933,635) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 17,807,735 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai (Rp.10,106,350)).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Cat.	TA 2025				TA 2024
			Anggaran	Realisasi	Realisasi Diatas (Bawah) Anggaran	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	217,762,000	80,873,500	(136,888,500)	37.14	84,738,800
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		217,762,000	80,873,500	(136,888,500)	37.14	84,738,800
B.	Belanja Negara	B.2					
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0				
2.	Belanja Barang	B.2.2.	300,237,000	95,018,180	(205,218,820)	31.65	148,601,750
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0				
	Jumlah Belanja Negara		300,237,000	95,018,180	(205,218,820)	31.65	148,601,750

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NERACA
PER 30 Juni 2025 DAN 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	18,000,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1 2.	3,052,200,224	0
Persediaan	C.1. 3.	4,714,150	5,019,550
Jumlah Aset Lancar		3,074,914,374	5,019,550
Jumlah Aset		3,074,914,374	5,019,550
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.2		
Utang Kepada Pihak ketiga	C.2 1.	3,052,200,224	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.2. 2.	14,820,500	0
Uang Muka dari KPPN	C.2. 3.	18,000,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3,085,020,724	0
Jumlah Kewajiban		3,085,020,724	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	(10,106,350)	5,019,550
Jumlah Ekuitas		(10,106,350)	5,019,550
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		3,074,914,374	5,019,550

** Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	80,873,500	84,738,800
Jumlah Pendapatan		80,873,500	84,738,800
Beban			
Beban Persediaan	D. 2	22,772,755	48,198,910
Beban Barang dan Jasa	D. 3	81,444,380	119,128,250
Beban Pemeliharaan	D. 4	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 5	9,590,000	4,950,000
Jumlah Beban		113,807,135	172,277,160
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(32,933,635)	(87,538,360)
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(32,933,635)	(87,538,360)
Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS (DEFISIT) Laporan Operasional		(32,933,635)	(87,538,360)

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Ekuitas Awal	E. 1	5,019,550	6,048,350
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(32,933,635)	(87,538,360)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	17,807,735	69,716,360
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(15,125,900)	(17,822,000)
Ekuitas Akhir		(10,106,350)	(11,773,650)

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sleman

Visi Pengadilan Negeri Sleman adalah

Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat

serta mampu menjawab panggilan pelayanan public khususnya pada Peradilan Tingkat Pertama.

Misi Pengadilan Negeri Sleman adalah

1. Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur;
2. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar;
3. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar;
4. Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan;
5. Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas;
6. Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, integritas, dapat dipercaya, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sleman melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian dalam menangani administrasi perkara
2. Meningkatkan tertib administrasi dan penegakan hukum
3. Meningkatkan jumlah perkara yang diproses/diselesaikan oleh Majelis Hakim secara cepat, adil, akuntabel dan transparan;
4. Meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia pada lingkungan Pengadilan Negeri Sleman.
5. Meningkatkan dukungan koordinasi, kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana sebagai modal bagi penyelesaian tugas di Kepaniteraan / Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sleman.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sleman. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar

nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none">1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman memperoleh alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 300,237,000. Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Sleman mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak empat (4) kali dari DIPA awal, yaitu berupa revisi Efisiensi anggaran, Pembukaan blokir sebagian efisiensi anggaran, POK dan Revisi Halaman III DIPA.

Pagu DIPA berdasarkan sumber Pendapatan dan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	2025	
	Anggaran awal	Anggaran setelah revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	217,762,000	217,762,000
Penerimaan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah	217,762,000	217,762,000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	300,237,000	300,237,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	300,237,000	300,237,000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.80.873.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 80,873,500 atau mencapai 40 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 217,762,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sleman adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
-----	--------	---------------------	-----------	---

1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	340,000	160,000	47.06
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	17,240,000	7,670,000	44.49
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	53.825,000	22,025,000	40.92
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	146.357,000	51,018,500	34.86
	Total Pendapatan	217,762,000	80,873,500	37.14

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 30 Juni TA 2025 mengalami penurunan sebesar 4.56 persen dibandingkan 30 Juni TA 2024. Hal ini disebabkan karena fluktuasi perkara yang berdampak pada PNBP perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Sleman pada TA 2025. Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	2024	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	160,000	300,000	(46.67)
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	7,670,000	8,060,000	(4.84)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	22,025,000	23,335,000	(5.61)
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51,018,500	53,043,800	(3.82)
	Total Pendapatan	80,873,500	84,738,800	(4.56)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
95.018.180

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp. 95,018,180 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 31.65% dari

anggaran senilai Rp. 300,237,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	300,237,000	95,018,180	31.65
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	300,237,000	95,018,180	31.65
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	300,237,000	95,018,180	31.65

Realisasi belanja barang pada Semester I TA 2025 mencapai 31,65 persen atau sebesar Rp. 95,018,180. Hal ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 36,06 % atau sebesar Rp.53.583.570.

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni TA 2025 dan 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	95,018,180	148,601,750	(36.06)
Belanja Modal	0	0	0
Total	95,018,180	148,601,750	(36.06)

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.95.018.180

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 95,018,180 dan Rp. 148,601,750.

Prosentase Realisasi Belanja Barang 30 Juni TA 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan prosentase realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan antara terjadinya Efisiensi Anggaran di awal triwulan sehingga berdampak pada akselerasi belanja untuk mendukung aktivitas perkantoran dan penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
	Realisasi	Realisasi	
Belanja Bahan Belanja	14,009,955	10,851,000	
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			29.11
Belanja Bahan	37,613,925	93,277,250	(59.68)
Barang Persediaan Barang	18,804,300	24,523,500	
Konsumsi			(23.32)
Belanja Jasa Konsultan	15,000,000	15,000,000	0.00
Belanja Jasa Profesi	0	0	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	750,000	(100.00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,590,000	4,200,000	128.33
Total Belanja Brutto	95,018,180	148,601,750	(36.06)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	95,018,180	148,601,750	(36.06)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

ASET

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp
3.074.914.374*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,074,914,374 dan Rp. 5,019,550.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 6 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	18,000,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,052,200,224	0
Persediaan	4,714,150	5,019,550
Total Aset Lancar	3,074,914,374	5,019,550

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp18.000.000*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.15.000.000 dan Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2025	31 Desember TA 2024
1	Uang Tunai di Brankas	2.642.200	0

2	Saldo Pajak	0	0
3	Uang di Rekening Bank	537.380	0
3	Selisih Kas karena Pembukuan	(80)	0
4	Kuitansi yang belum di SP2D kan	14.820.500	0
Jumlah		18.000.000	0

Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara bulan Juni 2025 yang direkonsiliasi dengan KPPN Yogyakarta tanggal 3 Juli 2025 menunjukkan keadaan Kas pada akhir bulan, uang tunai di Brankas Rp.2.642.200 dimana Rp.0 merupakan Saldo Pajak, uang di rekening Bank Rp. 537.380 dengan kuitansi yang belum diSP2D kan Rp. 14.820.500 sehingga selisih pembukuan Rp.(80),-

C.2. Kas Lainnya Setara Kas

Kas Lainnya
Setara Kas:
Rp.3.052.200.2
24

Saldo Kas Lainnya Setara kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 3,052,200,224 dan Rp.0.

Kas Lainnya setara kas merupakan kas pada Bendahara yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi Kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Kas Lainnya Setara Kas yang ada di Pengadilan Negeri Sleman merupakan Saldo pada rekening RPL Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di Rekening PT.BTN Cabang Yogyakarta No. rekening 00005-01-30-000663-9 a.n. RPL 030 PDT PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3. Hal ini sesuai dengan surrat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2702/SEK/KU.04/11/2022 tentang Perlakuan RPL untuk menampung biaya proses pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan Nota Dinas Nomor ND-1552/PB.3/2022 Direktorat Pengelolaan Kas Negara tentang Perlakuan RPL untuk menampung biaya proses lingkup satuan kerja Mahkamah Agung pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Bendahara. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni TA 2025	31 Desember TA 2024
Saldo pada rekening RPL kepaniteraan (No. rek 00005-01-30- 000663-9)	3,052,200,224	0
Jumlah	3,052,200,224	0

C.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp.4.714.150*

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,714,150 dan Rp. 5,019,550. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	4,714,150	5,019,550
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0

Total	4,714,150	5,019,550
-------	-----------	-----------

KEWAJIBAN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp.3.085.020.724*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 3,085,020,724 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 10. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Utang kepada Pihak Ketiga	3,052,200,224	0
Utang Yang belum Ditagihkan	14,820,500	0
Uang Muka dari KPPN	18,000,000	0
Jumlah	3,085,020,724	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp.3.052.200.224*

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 3,052,200,224 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang kepada pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Sleman merupakan Saldo pada rekening RPL kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di Rekening PT.BTN Cabang Yogyakarta No. rekening 00005-01-30-000663-9 a.n. RPL 030 PDT PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2702/SEK/KU.04/11/2022 tentang Perlakuan RPL untuk menampung biaya proses pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan Nota Dinas Nomor ND-1552/PB.3/2022 Direktorat Pengelolaan Kas Negara tentang Perlakuan RPL

untuk menampung biaya proses lingkup satuan kerja Mahkamah Agung pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara. Rincian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni TA 2025	31 Desember TA 2024
Saldo pada rekening RPL kepaniteraan (No. rek 00005-01-30- 000663-9)	3,052,200,224	0
Jumlah	3,052,200,224	0

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp.18.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.18.000.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.10.106.350

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp.10,106,350) dan Rp. 5,019,550. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP:
Rp.80.873.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 80,873,500 dan Rp. 84,738,800. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 12 Rincian PNBP per 30 Juni TA 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	160,000	300,000	(46.67)
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	7,670,000	8,060,000	(4.84)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	22,025,000	23,335,000	(5.61)
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51,018,500	53,043,800	(3.82)
	Total Pendapatan	80,873,500	84,738,800	(4.56)

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan LO dan Pendapatan LRA per 30 Juni 2025, sebagai berikut:

No.	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Pengesahan Surat . Dibawah Tangan	160,000	160,000	0
2	Pendapatan Uang Meja (Leges) . dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	7,670,000	7,670,000	0
3	Pendapatan Ongkos Perkara .	22,025,000	22,025,000	0
4	Pendapatan Kejaksaan dan . Peradilan Lainnya	51,018,500	51,018,500	0
	Total Pendapatan	80,873,500	80,873,500	0

D.2. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.22.772.755*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 22,772,755 dan Rp. 48,198,910. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	22,772,755	48,198,910	
Total Beban Persediaan	22,772,755	48,198,910	

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Persediaan Konsumsi LO dan Belanja Persediaan LRA per 30 Juni 2025. Beban Persediaan LO sebesar Rp. 22,772,755 sementara Belanja Persediaan LRA sebesar Rp. 18,804,300. Perincian perbedaan adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	Belanja/beban Persediaan Konsumsi	22,772,755	18,804,300	3,139,300
2	Belanja/Beban Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
	Total Beban/Belanja Persediaan	22,772,755	18,804,300	3,139,300

Perbedaan atau selisih tersebut disebabkan karena pada LRA pengakuan belanja persediaan diakui berdasarkan nilai belanja yang dikeluarkan (SP2D/ basis kas), sedangkan pada LO didasarkan juga pada mutasi penggunaan barang konsumsi saja dan dipengaruhi adanya transfer masuk.

URAIAN

Saldo awal di Neraca	Rp. 5,019,550
Pembelian persediaan (LRA)	Rp. 18,804,300
Transfer Masuk persediaan	<u>Rp. 3.663.055₊</u>
	Rp.27.486.905
Pemakaian Persediaan	<u>Rp.22.772.755 -</u>
Saldo akhir Neraca	Rp. 4.714.150
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	Rp. 0
LO (Pemakaian dikurangi Beban Persediaan untuk Pemeliharaan)	Rp. 22,772,755

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp.81.444.380*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 81,444,380 dan Rp.119,128,250. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Beban Pengiriman Surat Dinas	18,390,755	10,851,000	
Pos Pusat			69.48
Beban Bahan	48,053,625	93,277,250	(48.48)
Beban Jasa Konsultan	15,000,000	15,000,000	0.00
Total Beban Jasa	81,444,380	119,128,250	(31.63)

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Barang dan Jasa LO dan Belanja Barang dan Jasa LRA per 30 Juni 2025. Beban Barang dan Jasa LO sebesar Rp. 81,444,380 sementara Belanja Barang dan Jasa LRA sebesar Rp. 66,623,880. Perincian perbedaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,390,755	14,009,955	4,380,800
2	Beban Bahan	48,053,625	37,613,925	10,439,700
3	Beban Jasa Konsultan	15,000,000	15,000,000	0

Total Beban Barang dan Jasa	81,444,380	66,623,880	14,820,500
-----------------------------	------------	------------	------------

Penjelasan atas perbedaan nilai pada Beban Barang LO dan Jasa dan Belanja Beban Barang dan Jasa LRA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat terdapat kuitansi pos sebesar Rp.4.380.800 yang belum di GU-kan pada bulan Juni 2025 sehingga menambah nilai LO.
2. Pada beban Bahan terdapat kuitansi sebesar Rp.10.439.700 yang belum di GU-kan pada bulan Juni 2025 sehingga menambah nilai LO.

D.4. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.9.590.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,590,000 dan Rp. 4,950,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	0	750,000	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	9,590,000	4,200,000	128.33
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	#DIV/0!
Total Beban Perjalanan Dinas	9,590,000	4,950,000	93.74

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Beban Perjalanan Dinas LO dan Belanja Perjalanan Dinas LRA per 30 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
----	--------	----	-----	-----------

1	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	9,590,000	9,590,000	0
	Total Beban Perjalanan Dinas	9,590,000	9,590,000	0

D.5. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Surplus Pelepasan asset Non Lancar	0	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Surplus Kegiatan Non Operasional lainnya:	0	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Total Surplus Kegiatan Non Operasional	0	0	0

D.6. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal : Rp.5.019.550 Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,019,550 dan Rp.6,048,350.

E.2. Surplus (defisit) LO

Defisit LO : (Rp.32.933.635) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp.32,933,635) dan (Rp.87,538,360). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp.0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp114.850. Tidak terdapat Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap : Rp.0 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi : Rp.0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-
lain : Rp.0*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat koreksi lain-lain pada periode pelaporan.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi antar
entitas :
Rp.17.807.735*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 17,807,735 dan Rp. 69,716,360.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 16 Transaksi Antar Entitas
per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Jenis	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	95,018,180
Diterima dari Entitas Lain	(80,873,500)
Transfer Masuk	3,663,055
Jumlah	17,807,735

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL : Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar (Rp. 80,873,500) dan DKEL sebesar Rp. 95,018,180.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 3,663,055 terdiri dari:

**Tabel 17 Transfer Masuk
per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

No	Jenis/Keterangan	Entitas Awal	Nilai
1	Barang Persediaan	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Rp.3,663,055
Jumlah			Rp.3,663,055

Transfer Masuk merupakan Barang Persediaan berupa buku jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan perkara, buku register perkara perdata, buku register perkara pidana, buku register perkara pidana anak, buku kas bantu dan SKUM dengan total barang sebanyak 48 buah dengan nilai total Rp. 3,663,055, dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan BAST Nomor 17/SEK2.W13-U/PL.1.1.1/I/2025 tanggal 13 Januari 2025.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (10,106,350) dan Rp. (11,773,650).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sleman adalah:

1. PT.BTN Cabang Yogyakarta A/C 00005-01-30-000663-9 a.n. RPL 030 PDT PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 3,052,200,224.
2. Virtual Account BRI KC Sudirman A/C 654440991311000 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI SLEMAN QQ 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.537.380.

F.2.3. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Pengadilan Negeri Sleman sebagai Lembaga Yudikatif mengelola sumber pembiayaan yang berasal dari bagian anggaran pada APBN dan sumber lain untuk pembiayaan perkara perdata dari pihak berperkara yang disebut sebagai biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara. Di samping itu, pada pengadilan juga terdapat uang/barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan.

Yang dimaksud dengan biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara adalah seluruh pengeluaran pada perkara perdata yang dibebankan ke pihak berperkara (penggugat/pemohon) yang terdiri dari:

- a. Biaya kepaniteraan (*griffier kosten*) yang lebih dikenal sebagai hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan atas layanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara sebagai PNBK dengan jenis dan tarifnya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah
- b. Ongkos perkara/biaya proses yang merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi antara lain biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada proses awal dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali karenanya negara tidak mengalokasikan anggarannya atas biaya perkara perdata pada APBN melalui DIPA, kecuali atas perkara prodeo bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan nilai gugatan dibawah 150 juta.

Selain biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara pada pengadilan juga terdapat uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara yaitu uang konsinyasi, uang atas barang bukti perkara dan uang atas jaminan penangguhan penahanan yang dititipkan dan/atau disimpan di kepaniteraan dan juga uang-uang lain yang tersimpan di pengadilan antara lain uang sisa hasil pelaksanaan lelang aset debitur (pihak yang berhutang) yang dijaminan setelah dibayarkan seluruh kewajiban pihak debitur kepada kreditur (pihak yang berpiutang/yang mengajukan klaim) masih terdapat sisa yang belum dikembalikan kepada debitur, dan/atau uang lainnya yang masih terkait/berhubungan

dengan perkara.

Biaya proses penyelesaian perkara atau biaya perkara dalam pedoman ini disebut sebagai uang titipan pihak ketiga dan uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara di kepaniteraan peradilan termasuk uang lainnya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara disebut sebagai uang titipan pihak ketiga lainnya.

Uang titipan pihak ketiga dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan dan dicatat pada Buku Keuangan Perkara, dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta diungkapkan dalam CaLK Pengadilan Negeri Sleman.

Sebagai wujud dari akuntabilitas, transparansi dan asas full disclosure atas pelaporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka terhadap uang titipan pihak ketiga lainnya dicatat pada Buku Keuangan Perkara Lainnya serta diungkapkan dalam CaLK Pengadilan Negeri Sleman.

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara di Rekening PT.BTN Cabang Yogyakarta No. rekening 00005-01-30-000663-9 a.n. RPL 030 PDT PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Induk Perkara yaitu sebesar Rp. 573.467.350
2. Laporan Keuangan Konsinyasi yaitu sebesar Rp. 1.589.713.025
3. Laporan Keuangan Eksekusi yaitu sebesar Rp. 519.925.300
4. Laporan Uang titipan Sisa Hasil Lelang
yaitu sebesar Rp. 374.918.440

Rekapitulasi Keadaan Keuangan Perkara
1 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025

No	Uraian	Keadaan Keuangan			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Biaya Perkara	590,003,750	357,018,100	373,554,500	573,467,350
2	Biaya Eksekusi	571,726,750	175,869,000	227,670,450	519,925,300
3	Biaya Konsinyasi	2,340,545,825	-	750,832,800	1,589,713,025
4	Uang Titipan Lelang				

		374,918,440	763,970,000	763,970,000	374,918,440
5	PHI	-	-	-	-
6	Biaya Proses	-	-	-	-
	Jumlah Saldo Buku	3,877,194,765	1,296,857,100	2,116,027,750	3,058,024,115
	Kas di Bank				3,052,200,224
	Kas di Brankas				7,397,691
	Jumlah Saldo Kas				3,059,597,915
	Selisih				1,573,800
	Keterangan :				
	Penjelasan Selisih : 1. Perkara Gugatan yang belum di register sebesar Rp.1.137.800,00 karena masih ada perbaikan gugatan				
	2. 1 salinan elektronik yang belum di catat sebesar Rp.13.500,00 karena di bayarkan pada pukul 16:42;12				
	3. 1 perkara gugatan yang belum di register sebesar Rp.422.500,00 yang dibayarkan pada pukul 17:42:33				

Rincian informasi mengenai saldo akhir biaya perkara di Rekening PT.BTN Cabang Yogyakarta No. rekening 00005-01-30-000663-9 a.n. RPL 030 PDT PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 18 Laporan Induk Keuangan Perkara
Pengadilan Negeri Sleman
Bulan : JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

Nomor	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Saldo bulan Lalu	551,109,350.00	-
2	Penerimaan bulan Juni 2025	69,842,000.00	-
3	Biaya Proses		9,700,000.00
4	Biaya PNBP Pendaftaran	-	4,400,000.00
5	PNBP dari redaksi	-	1,130,000.00
6	PNBP dari panggilan dan pemberitahuan	-	3,250,000.00
7	PNBP Pemeriksaan Setempat	-	20,000.00
8	PNB Penyerahan Akta Pernyataan Kasasi	-	-

9	PNBP Akta Pernyataan Banding	-	70,000.00
10	PNBP Akta Pernyataan PK	-	-
11	PNBP Penyerahan Akta Keberatan	-	-
12	PNBP Salinan Putusan Elektronik	-	885,000.00
13	PNBP Pencabutan Gugatan	-	50,000.00
14	PNBP Pencabutan Banding	-	-
15	PNBP Pencabutan PK	-	-
16	PNBP Pencabutan permohonan	-	80,000.00
17	PNBP Pendaftaran Sita	-	-
18	PNBP Berita Acara Sita	-	-
19	PNPB Penetapan Sita	-	-
20	PNPB Sisa Panjar yang Disetor Ke Negara	-	-
21	PNPB Leges Salinan Elektronik	-	1,232,500.00
22	PNBP Penyumpahan Novum	-	-
23	Biaya Sita	-	-
24	Biaya Angkat Sita	-	-
25	Biaya Panggilan	-	9,144,900.00
26	Biaya Pemberitahuan	-	580,000.00
27	Biaya Pemeriksaan setempat	-	2,715,000.00
28	Pengiriman Biaya	-	1,450,000.00
29	Blaya Kirim Berkas	-	-
30	Biaya Sumpah	-	1,880,000.00
31	Biaya Penggandaan	-	623,100.00
32	Materai	-	1,130,000.00
33	Pengembalian Sisa Biaya Perkara	-	9,052,700.00
34	Biaya Administrasi Bank	-	12,500.00

35	Biaya Kliring	-	78,300.00
36	Lain-lain	-	-
34	Jumlah	620,951,350.00	47,484,000.00
35	Saldo Bulan Juni 2025		573,467,350.00
	JUMLAH	620,951,350.00	620,951,350.00

Tabel 19 Laporan uang Konsinyasi Pengadilan Negeri Sleman
Bulan : JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

Nomor	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo bulan lalu	1.589.713.025.00	-
2	Biaya Panjar	-	-
3	Uang Titipan	-	-
4	Biaya Proses	-	-
5	Materai	-	-
6	Redaksi	-	-
7	PNPB Penetapan Penawaran	-	-
8	PNPB Berita Acara Penawaran	-	-
9	PNPB Berita Acara Konsinyasi	-	-
10	PNBP Panggilan	-	-
11	Biaya Penawaran	-	-
12	Biaya Penyimpanan	-	-
13	Biaya Iklan	-	-
14	Penyerahan Uang Consignasi	-	-
15	Pengembalian Sisa	-	-
16	Biaya Wesel	-	-
17	Biaya Panggilan	-	-
18	Lain -lain	-	-
19	jumlah	1.589.713.025	-

	Saldo Bulan Juni 2025	-	1.589.713.025
		1.589.713.025	1.589.713.025

Tabel 20 Laporan Keuangan Biaya Eksekusi Pengadilan Negeri Sleman
Bulan : JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

Nomor	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Saldo bulan lalu	531.128.300.00	-
2	Penerimaan bln Juni 2025	25.000.000.00	-
3	Biaya Pemberkasan/ATK	-	300.000.00
4	Biaya Proses	-	100.000.00
5	Materai	-	50.000.00
6	PNBP	-	325.000.00
7	Biaya Panggilan/Pemb	-	-
8	Biaya Iklan	-	15.568.000.00
9	Biaya Eksekusi	-	-
10	Biaya Sita/Angkat Sita	-	6.240.000,00
11	SKPT	-	50.000.00
12	Pajak	-	150.000.00
13	Pengembalian Sisa	-	10.000,00
14	Biaya Lelang	-	-
15	Appraisal	-	6.000.000,00
16	Biaya Pengosongan	-	7.410.000.00
17	Biaya Pembatalan Lelang	-	-
18	Konstatering	-	-
19	Biaya Kirim	-	-
20	Jumlah	556.128.300.00	36.203.000.00
	Saldo akhir bulan Juni 2025	-	519.925.300.00
		556.128.300.00	556.128.300.00

**Tabel 21 Laporan Uang Titipan Sisa hasil Lelang
per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
02/06/2025	Saldo bulan lalu	374.918.440	-
		374.918.440	
30/06/2025	Saldo akhir bulan Juni 2025		374.918.440.00
	Jumlah	374.918.440	374.918.440

F.2.4. Capaian Rincian Output dan Pengungkapan Program Prioritas Nasional

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI SLEMAN PER 30 JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/ Lembaga : Mahkamah Agung (005)
 Unit Organisasi : Badan Peradilan Umum (03)
 Satuan kerja : Pengadilan Negeri Sleman (099131)
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan (03)
 Sub Fungsi : Peradilan (03.04)
 Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.BF)
 Lokasi : Yogyakarta (040)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8
005.03.BF.1049.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	300.237.000	95,018,180	31,64			
1049.AEA	-Koordinasi_ Percepatan Penyelesaian Perkara	2,250,000	0	0	2	2	Kegiatan
1049.BCA	-Perkara Hukum Perseorangan_ Perkara Pidana yang Diselesaikan	261,267,000	80,018,180	30,63	612	372	Perkara

	Ditingkat Pertama di wilayah Barat								
1049.QBA	-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan_ Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	36,000,000	15,000,000	41,67	356	180	Orang	50,00	
1049.QCA	-Perkara Hukum Perseorangan_ Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	720,000	0	0	2	2	Perkara	100,00	
	Subtotal	300.237.000	95,018,180	31,64					
	Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	300.237.000	95,018,180	31,64					

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Pengadilan Negeri Sleman DIPA 099131 terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya pada Pengadilan Negeri Sleman di antaranya melalui 1 program prioritas, 2 kegiatan prioritas, dengan total pagu mencapai Rp 36.720.000 dan total realisasi sebesar Rp 15.000.000. Rincian Output Perkara Hukum Perseorangan_ Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara telah tercapai di bulan Juni 2025 sebanyak 2 perkara dengan realisasi anggaran masuk GU bulan Juli 2025. Rincian output Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

Nama Satker	Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Pengadilan Negeri Sleman	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan_ Layanan Pos	36,000,000	15,000,000	41,67	Orang	356	180	49,98

	Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum							
Pengadilan Negeri Sleman	-Perkara Hukum Perseorangan_ Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	720,000	0	0	Perkara	2	2	100,00
TOTAL		36.720.000	15.000.000					

F.2.5. Revisi DIPA

Terdapat revisi DIPA sebanyak 4 kali pada semester I TA 2025 sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke 01 tanggal 22 Februari 2025 terkait Revisi Efisiensi Anggaran
2. Revisi DIPA ke 02 tanggal 21 Maret 2025 terkait Penyesuaian Halaman III DIPA
3. Revisi DIPA ke 03 tanggal 22 April 2025 terkait Revisi Pembukaan Blokir sebagian atas Efisiensi Anggaran
4. Revisi DIPA ke 04 tanggal 22 Mei 2025 terkait Penyesuaian Halaman III DIPA

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP maupun SSPB yang perlu mendapat penyelesaian lebih lanjut di dalam Tahun Anggaran 2025

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, serta surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 2651/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 29 April 2024 maka terjadi perubahan pejabat perbendaharaan TA 2025 sebagai berikut:

SEMULA :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yuyun Fithriyah, S.E., Ak
Pejabat Pembuat Komitmen	: Girindra Rasika Listunimitta, SH
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ahmad Alamsyah, ST
Bendahara Pengeluaran	: Zuni Atmawati, A.Md
Bendahara Penerimaan	: Dyah Rahajeng Indreswari, SE, MBA

MENJADI :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yuyun Fithriyah, S.E., Ak
Pejabat Pembuat Komitmen	: Yuyun Fithriyah, S.E., Ak
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Wirrawan Dwi Asmara, SIP
Bendahara Pengeluaran	: Girindra Rasika Listunimitta, SH
Bendahara Penerimaan	: Dyah Rahajeng Indreswari, SE, MBA

LAPORAN PENDUKUNG



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 099131
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	300,237,000	300,237,000	0
2	Belanja	95,018,180	95,018,180	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	217,762,000	217,762,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	80,873,500	80,873,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	18,000,000	18,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	18,000,000	18,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20-JUL-25



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SLEMAN 099131

Tgl Data : 21/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 21/07/25 2:57 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	217,762,000	80,873,500	(136,888,500)	37.14	214,511,000	84,738,800	(129,772,200)	39.5
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	217,762,000	80,873,500	(136,888,500)	37.14	214,511,000	84,738,800	(129,772,200)	39.5
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	217,762,000	80,873,500	(136,888,500)	37.14	214,511,000	84,738,800	(129,772,200)	39.5
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	300,237,000	95,018,180	(205,218,820)	31.65	317,010,000	148,601,750	(168,408,250)	46.88
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	300,237,000	95,018,180	(205,218,820)	31.65	317,010,000	148,601,750	(168,408,250)	46.88
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SLEMAN 099131

Tgl Data : 21/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 21/07/25 2:57 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	300,237,000	95,018,180	(205,218,820)	31.65	317,010,000	148,601,750	(168,408,250)	46.88
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

SLEMAN, 21 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
MUASA PENGGUNA ANGGARAN
YUSUF FITRIYAH, S.E., Ak
NIP. 197908222005022001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **Ditjen Badan Peradilan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 099131 **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 21/07/25 2:58 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	340,000	160,000	0	160,000	47.06
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	17,240,000	7,670,000	0	7,670,000	44.49
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	53,825,000	22,025,000	0	22,025,000	40.92
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	146,357,000	51,018,500	0	51,018,500	34.86
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	217,762,000	80,873,500	0	80,873,500	37.14
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	217,762,000	80,873,500	0	80,873,500	37.14
	JUMLAH PENDAPATAN	217,762,000	80,873,500	0	80,873,500	37.14

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **Ditjen Badan Peradilan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 099131 **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/25 2:58 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/7/25 2:34 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39,660,000	43,650,000	14,009,955	0	14,009,955	32.1	29,640,045
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	39,660,000	43,650,000	14,009,955	0	14,009,955	32.1	29,640,045
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	141,670,000	137,670,000	37,613,925	0	37,613,925	27.32	100,056,075
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	141,670,000	137,670,000	37,613,925	0	37,613,925	27.32	100,056,075
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56,557,000	56,567,000	18,804,300	0	18,804,300	33.24	37,762,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	56,557,000	56,567,000	18,804,300	0	18,804,300	33.24	37,762,700
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	36,000,000	15,000,000	0	15,000,000	41.67	21,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,300,000	36,300,000	15,000,000	0	15,000,000	41.32	21,300,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,800,000	23,800,000	9,590,000	0	9,590,000	40.29	14,210,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	26,050,000	26,050,000	9,590,000	0	9,590,000	36.81	16,460,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	300,237,000	300,237,000	95,018,180	0	95,018,180	31.65	205,218,820
	JUMLAH BELANJA	300,237,000	300,237,000	95,018,180	0	95,018,180	31.65	205,218,820

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 21/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 21/07/25 2:57 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	18,000,000	0	18,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,052,200,224	0	3,052,200,224	0.00
Persediaan	4,714,150	5,019,550	(305,400)	(6.08)
JUMLAH ASET LANCAR	3,074,914,374	5,019,550	3,069,894,824	61,158.77
JUMLAH ASET	3,074,914,374	5,019,550	3,069,894,824	61,158.77
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,052,200,224	0	3,052,200,224	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	14,820,500	0	14,820,500	0.00
Uang Muka dari KPPN	18,000,000	0	18,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,085,020,724	0	3,085,020,724	
JUMLAH KEWAJIBAN	3,085,020,724	0	3,085,020,724	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(10,106,350)	5,019,550	(15,125,900)	(301.34)
JUMLAH EKUITAS	(10,106,350)	5,019,550	(15,125,900)	(301.34)
JUMLAH EKUITAS	(10,106,350)	5,019,550	(15,125,900)	(301.34)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,074,914,374	5,019,550	3,069,894,824	61,158.77

Keterangan :
FINAL

SLEMAN, 21 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEASA PENGGUNA ANGGARAN
YUYUN FITHRİYAH, S.E., Ak
NIP. 197908222005022001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 21/07/25 1:09 PM

Tgl Cetak : 21/07/25 2:57 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	18,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	3,052,200,224	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,714,150	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	3,052,200,224
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	14,820,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	18,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	95,018,180
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	80,873,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,663,055
0.0	391111	Ekuitas	0	5,019,550
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	160,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	7,670,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	22,025,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	51,018,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,390,755	0
3.0	521211	Beban Bahan	48,053,625	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,590,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	22,772,755	0
JUMLAH			3,269,595,009	3,269,595,009

Keterangan :

FINAL

SLEMAN, 21 Juli 2025

Peranggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



YU FATHIRIYAH, S.E., Ak

NIP. 197908222005022001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 21/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 21/07/25 2:58 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	95,018,180
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	80,873,500	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	160,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	7,670,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	22,025,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	51,018,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,009,955	0
3.0	521211	Belanja Bahan	37,613,925	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,804,300	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,590,000	0
JUMLAH			175,891,680	175,891,680

Keterangan :

FINAL

SLEMAN, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGUNA ANGGARAN



YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak

197908222005022001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 21/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 21/07/25 2:56 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	80,873,500	84,738,800	(3,865,300)	(4.561)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	80,873,500	84,738,800	(3,865,300)	(4.561)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	80,873,500	84,738,800	(3,865,300)	(4.561)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	22,772,755	48,198,910	(25,426,155)	(52.753)
Beban Barang dan Jasa	81,444,380	119,128,250	(37,683,870)	(31.633)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	9,590,000	4,950,000	4,640,000	93.737
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 21/07/25 1:09 PM

Tgl Cetak : 21/07/25 2:56 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	113,807,135	172,277,160	(58,470,025)	(33.94)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(32,933,635)	(87,538,360)	54,604,725	(62.378)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(32,933,635)	(87,538,360)	54,604,725	(62.378)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(32,933,635)	(87,538,360)	54,604,725	(62.378)

Keterangan :

FINAL



SELEMAN, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YUYUN FITRIYAH, S.E., Ak

NIP. 197908222005022001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 21/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 21/07/25 2:57 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,019,550	6,048,350	(1,028,800)	(17.01)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(32,933,635)	(87,538,360)	54,604,725	(62.38)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,807,735	69,716,360	(51,908,625)	(74.46)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(15,125,900)	(17,822,000)	2,696,100	(15.13)
EKUITAS AKHIR	(10,106,350)	(11,773,650)	1,667,300	(14.16)

Keterangan :

FINAL

SLEMAN, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WUSLON FITHRIYAH, S.E., Ak

NIP. 197908222005022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Eselon I : (03) BADAN PERADILAN UMUM
 Wilayah : (0400) YOGYAKARTA
 Satuan Kerja : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 02-01-2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : JURNAL BALIK SALDO RPL

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan	<input checked="" type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	Perolehan Aset
<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban	<input type="checkbox"/>	Koreksi Piutang/Utang
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input type="checkbox"/>	Hibah Langsung
<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	


JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	3,862,876,324	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		3,862,876,324


Diisi oleh :
 Tanggal : '02-01-2025
 (Kasubbag Umum dan Keuangan)


 Wirawan Dwi Asmara, S.I.P

Disetujui oleh :
 Tanggal : '02-01-2025
 (Sekretaris)


 Yuyun Pithriyah, S.E., Ak

Direkam oleh :
 Tanggal : '02-01-2025
 (Operator Aklap)


 Dyah R Indreswari, SE,MBA

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEMESTER I TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN
Kode dan Nama UAPPAW : (400343) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Eselon 1 : (03) BADAN PERADILAN UMUM
Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	V	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	V	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	N/A	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			

	Rekon SAKTI-SPAN <i>(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	N/A		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	N/A		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	N/A		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak

10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	3.663.055		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	(3.663.055)		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya

	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak

5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pelabab Penyusun PKK

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak
NIP.197908222005022001



Sleman, 21 Juli 2025
Penelaah,

DYAH R. INDRESWARI, SE., MBA
NIP.198207212009122006

Rekapitulasi Keuangan Perkara
Pengadilan Negeri Sleman
Periode 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

NO	URAIAN	Saldo awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo akhir (Rp)		TOTAL
					Rekening Bank	Dalam Brankas	
1	Biaya Perkara/Induk	590.003.750	357.018.100	373.554.500	566.649.044	6.818.306	573.467.350
2	Biaya Eksekusi	571.726.750	175.869.000	227.670.450	519.345.915	579.385	519.925.300
3	Biaya Konsinyasi	2.340.545.825	-	750.832.800	1.589.713.025	-	1.589.713.025
4	Uang Titipan Hasil Lelang	374.918.440	763.970.000	763.970.000	374.918.440	-	374.918.440
	Jumlah	3.877.194.765	1.296.857.100	2.116.027.750	3.050.626.424	7.397.691	3.058.024.115

Mengetahui,
 Plt Panitera



Hammam Haris, SH
 NIP. 19691124 199403 1 003



Kasir



IKA SULISTYO PUTRI, SE., SH., MBA
 NIP.19810816 200904 2 004

REKAPITULASI KEADAAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2025
1 JANUARI 2025- 30 JUNI 2025

Satker : Pengadilan Negeri Sleman

No.	Uraian	Keadaan Keuangan			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Biaya Perkara	590,003,750	357,018,100	373,554,500.00	573,467,350.00
2	Biaya Eksekusi	571,726,750	175,869,000	227,670,450.00	519,925,300.00
3	Biaya Konsinyasi	2,340,545,825	-	750,832,800.00	1,589,713,025.00
4	Uang Titipan Lelang	374,918,440	763,970,000	763,970,000.00	374,918,440.00
5	PHI	-	-	-	-
6	Biaya Proses				-
	Jumlah Saldo Buku	3,877,194,765.00	1,296,857,100.00	2,116,027,750.00	3,058,024,115.00
	Kas di Bank				3,052,200,224.00
	Kas di Brankas				7,397,691.00
	Jumlah Saldo Kas				3,059,597,915.00
	Selisih				1,573,800.00
	Keterangan :				
	Penjelasan Selisih : 1. Perkara Gugatan yang belum di register sebesar Rp.1.137.800,00 karena masih ada perbaikan gugatan				
	2. 1 salinan elektronik yang belum di catat sebesar Rp.13.500,00 karena di bayarkan pada pukul 16:42;12				
	3. 1 perkara gugatan yang belum di register sebesar Rp.422.500,00 yang dibayarkan pada pukul 17:42:33				

Mengetahui,
Plt Panitera

Hammam Harris, SH
NIP. 19691124 199403 1 003



Kasir



IKA SULISTYO PUTRI, SE.,SH.,MBA
NIP.19810816 200904 2 004

LAPORAN JASA GIRO REKENING DAN BUKTI PENYETORAN KAS NEGARA ATAS REKENING KEUANGAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA
PER 30 JUNI 2025

No	Satuan Kerja			REKENING			BANK			Kode	Persetujuan Rekening		JASA GIRO	KET
	BA	ES.1	Kode	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang	Rekening	Nomor	Tanggal		
Telah Menjadi Hak Negara														
Jumlah													0	
Belum / Tidak Menjadi HakNegara														
1			099131	0000501300006639	RPL PDT PN SLEMAN UNTUK BIAYA PERKARA		0090955C	BTN	YOGYAKARTA	30	S-1095/WPB-15/KP.01.04/2018	02-04-2018	NIHIL	SUDAH TNP
Jumlah													-	

Ketua Pengadilan Negeri Sleman



Wari Junlati, SH, MH
NIP.19690612-199603 2 003





Laporan Barang Kuasa Pengguna

SEMESTER I
TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A





Kata Pengantar

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Implikasinya, pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, melainkan juga meliputi seluruh aset yang dimiliki oleh negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagai bagian penting dari kekayaan negara, BMN harus dikelola secara efektif dan efisien demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pengelolaan BMN sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini disebabkan BMN adalah salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus terintegrasi dan transparan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Sleman, selaku salah satu unit Kuasa Pengguna Barang, berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. LBKP Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun 2025 ini berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun 2025 ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Dengan selesainya penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun 2025 ini, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung secara menyeluruh. Laporan ini juga diharapkan bermanfaat bagi pimpinan Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan BMN.

Sleman, 23 Juli 2025

Sekretaris selaku

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Sleman,



YUYUN FITHERIAH, S.E., Ak.

NIP. 197908222005022001



Daftar Isi

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA	1
I. PENDAHULUAN	3
A. Dasar Hukum	4
B. Entitas Pelaporan	6
C. Periode Pelaporan	6
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	6
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	7
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA Per 30 JUNI 2025	8
A. Saldo Awal	8
B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara	8
V. BARANG MILIK NEGARA LBKP SEMESTER I TAHUN 2025	10
A. BMN per Akun Neraca	10
B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan	11
VI. INFORMASI BMN LAINNYA	12
A. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN	12
B. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah	12



Daftar Lampiran

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan
2. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) - 1 Januari 2025
3. Laporan Posisi BMN Di Neraca per 30 Juni 2025
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan Intrakomptabel & Ekstrakomptabel
8. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB)
9. Laporan Barang Bersejarah
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya
11. Laporan Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola Untuk Periode
12. Laporan Barang BPYBDS
13. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
14. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
15. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB)
16. Laporan CRBMN
17. Laporan PNBPN
18. Laporan Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan
19. Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja
20. Neraca Percobaan (Basis Akrua)
21. Neraca Percobaan (Basis Kas)



Overview Laporan Barang Kuasa Pengguna

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun 2025 merupakan laporan semesteran yang disusun oleh Pengadilan Negeri Sleman selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Negara di pertengahan tahun periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBKP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Negeri Sleman selama Semester I Tahun Anggaran 2025. Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun Anggaran 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sleman berserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBKP Semester I ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun 2025. Upaya ini merupakan langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan BMN, yang merupakan aset berharga bagi negara. Diharapkan, langkah ini dapat mempertahankan opini *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) yang telah diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan LBKP ini, selain merupakan kewajiban administratif dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, juga berkontribusi pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dalam konteks hukum Indonesia, penyampaian laporan keuangan termasuk BMN harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penyusunan LBKP Semester I Tahun 2025 ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBKP Semester I Tahun 2025 ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-133/KN/KN.2/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Nomor S-135/KN/KN.2/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penyampaian Laporan

Barang Pengguna Tahun 2024. Dalam penyusunannya, LBKP Semester I Tahun 2025 ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan) serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

LBKP Semester I Tahun 2025 ini merupakan fondasi penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. LBKP Semester I Tahun 2025 ini memberikan informasi awal yang krusial mengenai seluruh aspek pengelolaan BMN, mendukung akuntabilitas pengelolaan aset, dan menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan andal. Penyusunan LBKP Semester I Tahun 2025 yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.



Berita Acara Rekonsiliasi Internal

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511

pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(KODE UAKPB: 005.03.0400.099131.000.KD)
NOMOR : 1549/SEK.PN.W13-U2/OT.01.02/VII/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Pengadilan Negeri Sleman, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : Taruli Basa Hutabarat, A.Md.
NIP : 199004132022032007
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada PN. Sleman, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Dyah Rahajeng Indreswari, SE.,MBA
NIP : 198207212009122006
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada PN. Sleman, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal PN Sleman dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LKKPA) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

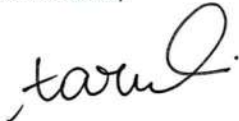
No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A. ASET LANCAR		5.019.550	-305.400	4.714.150
1. Persediaan		5.019.550	-305.400	4.714.150
B. ASET TETAP		0	0	0
1. Tanah		0	0	0
2. Peralatan dan Mesin		0	0	0
3. Gedung dan Bangunan		0	0	0
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0	0
5. Aset Tetap Lainnya		0	0	0
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0	0
7. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		0	0	0
8. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0	0	0
C. ASET LAINNYA		0	0	0
1. Aset Tidak Berwujud		0	0	0
2. Aset Lain-lain		0	0	0
3. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga		0	0	0
4. Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya		0	0	0
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		0	0	0
D. Total Intrakomptabel (A+B+C)		5.019.550	-305.400	4.714.150
E. Ekstrakomptabel		0	0	0
1. BMN Ekstrakomptabel		0	0	0
2. Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel		0	0	0
F. Total Gabungan (D+E)		5.019.550	-305.400	4.714.150

Rincian terlampir.

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester I Tahun Anggaran 2024, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



Taruli Basa Hutabarat, A.Md.
NIP. 199004132022032007

Pihak Kedua,





Dyah Rahajeng Indreswari, SE.,MBA
NIP. 198207212009122006


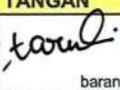
Sekretaris PN. Sleman
sebagai Penanggung Jawab UAKPA dan UAKPB



Yuyun Fitriyati, S.E., Ak.
NIP. 197908222005022001

LABEL KONTROL	<p>Pengelola Barang Milik Negara</p>  <p>Taruli Basa Hutabarat, A.Md. NIP. 19900413 202203 2 007</p>	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda</p>  <p>Dyah Rahajeng Indreswari, SE.,MBA NIP. 19820721 200912 2 006</p>
---------------	---	---

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 barang

II. PERIODE	
S 1	/ 2 5

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 - 0 3 - 0 4 0 0 - 0 9 9 1 3 1 - 0 0 0 - K D
2. Nama	PENGADILAN NEGERI SLEMAN

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	GLP	BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	ASET LANCAR	4.714.150	4.714.150	4.714.150
A.1.	Persediaan	4.714.150	4.714.150	4.714.150
B.	ASET TETAP	0	0	0
B.1.	Tanah	0	0	0
B.2.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
B.3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
B.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
B.5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
B.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
B.7.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
B.8.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0
C.1.	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
C.2.	Aset Lain-lain	0	0	0
C.3.	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
C.4.	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya	0	0	0
C.5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0	0
D.	SUB TOTAL (A+B+C)	4.714.150	4.714.150	4.714.150
E.	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
E.1.	Aset Ekstrakomptabel	0	0	0
E.2.	Akumulasi Penyusutan Aset Ekstrakomptabel	0	0	0
F.	TOTAL (D+E)	4.714.150	4.714.150	4.714.150

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN UNTUK PERIODE BERJALAN					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
A.	ASET LANCAR	4.714.150	0	0	4.714.150
A.1.	Persediaan	4.714.150	0	0	4.714.150
B.	ASET TETAP	0	0	0	0
B.1.	Tanah	0	0	0	0
B.2.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
B.3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
B.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
B.5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
B.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
B.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0	0
C.1.	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
C.2.	Aset Lain-lain	0	0	0	0
C.3.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0	0
D.	SUB TOTAL (A+B+C)	4.714.150	0	0	4.714.150
E.	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
E.1.	Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
E.2.	Akumulasi Penyusutan Aset	0	0	0	0
F.	TOTAL (D+E)	4.714.150	0	0	4.714.150

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN						
NO	PERKIRAAN NERACA	Belanja Modal	Belanja Non Modal			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
A.	ASET LANCAR	0	0	0	0	0
A.1.	Persediaan	0	0	0	0	0
B.	ASET TETAP	0	0	0	0	0
B.1.	Tanah	0	0	0	0	0
B.2.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
B.3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
B.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0
B.5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
B.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0	0	0
C.1.	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
C.2.	Aset Lain-lain	0	0	0	0	0
D.	SUB TOTAL (A+B+C)	0	0	0	0	0
E.	Ekstrakomptabel	0	0	0	0	0
F.	TOTAL (D+E)	0	0	0	0	0

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

1. Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 80.873.500,- (Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan berasal dari Pengesahan Surat di Bawah Tangan sebesar Rp 160.000- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Pendapatan berasal dari Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan sebesar Rp 7.670.000- (Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Pendapatan berasal dari Ongkos Perkara sebesar Rp 22.025.000- (Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - d. Pendapatan berasal dari Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar Rp 51.018.500- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah)

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Saldo awal periode Semester I Tahun Anggaran 2025 terdapat perbedaan antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp 0,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
 - a. NIHIL
 - b. -
2. Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp 0 ,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
 - a. NIHIL
 - b. -
3. Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama periode berjalan (pembelian dan pengembangan BMN) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp 0,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
 - a. NIHIL
 - b. -

LAMPIRAN BERITA ACARA
DAFTAR SPM/SP2D

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 barang

II. PERIODE	
S 1	/ 2 5

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 - 0 3 - 0 4 0 0 - 0 9 9 1 3 1 - 0 0 0 - K D
2. Nama	PENGADILAN NEGERI SLEMAN

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN UNTUK PERIODE BERJALAN							
NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BLJ	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1.					0	0	0
2.					0	0	0
3.					0	0	0
4.					0	0	0
5.					0	0	0
6.					0	0	0
7.					0	0	0
8.					0	0	0
9.					0	0	0
Jumlah					0	0	0

*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN							
NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BLJ	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1.					0	0	0
2.					0	0	0
3.					0	0	0
4.					0	0	0
5.					0	0	0
6.					0	0	0
7.					0	0	0
8.					0	0	0
9.					0	0	0
10.					0	0	0

*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN						
NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BLJ	RUPIAH SPM	KETERANGAN
1.					0	
2.					0	
3.					0	
4.					0	
5.					0	
6.					0	
7.					0	
8.					0	
9.					0	
10.					0	

*) apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri



Laporan Posisi BMN di Neraca- Saldo Awal

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tanggal : 25/07/25 8:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	5,019,550
J U M L A H		5,019,550



Laporan Posisi BMN di Neraca

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 099131 **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Tgl.Data : 25/07/25 6:27 AM
Tgl.Cetak : 25/07/25 8:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	4,714,150
J U M L A H		4,714,150

SLEMAN, 25 Juli 2025

Pepangung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



YUSUN FIFRIYAH, S.E., Ak
NIP. 197908222005022001



Laporan Barang Persediaan

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 099131 **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tanggal : 25/07/25 8:14 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	1,246,900
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	4,400
1010301003	Penjepit Kertas	538,200
1010301004	Penghapus/Korektor	35,000
1010301006	Ordner Dan Map	38,500
1010301010	Alat Perekat	478,650
1010301012	Staples	284,900
1010301013	Isi Staples	52,800
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	436,500
1010302001	Kertas HVS	303,600
1010302003	Kertas Cover	159,700
1010304004	Tinta/Toner Printer	1,060,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	75,000
Jumlah Barang Konsumsi		4,714,150
TOTAL		4,714,150

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



Laporan Barang Intrakomptabel

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 8:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SLEMAN, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



YUYUN PIRRIYAH S.E., Ak
NIP. 197908222005022001



Laporan Barang Ekstrakomptabel

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 8:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SLEMAN, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
YULYAN FITHRIYAH, S.E., Ak
NIP. 197908222005022001





Laporan Barang Gabungan

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 8:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SLEMAN, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG





Laporan Aset Tak Berwujud

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tanggal : 25/07/25 8:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SLEMAN 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
YUYUN FITHRIYAH S.E., Ak
NIP. 197908222005022001





Laporan Barang Bersejarah

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tanggal : 25/07/25 8:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker_poc

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2025
KODE	URAIAN			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7

SLEMAN, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak
NIP. 97908222005022001



Laporan Barang Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KODE UAKPB : 099131

TANGGAL : 25-07-2025
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN: 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

SLEMAN, 25 JULI 2025
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



YUYUN FITRIYAH, S.E., Ak
NIP. 197908222005022001



Laporan Barang Hilang yang sudah diusulkan ke Pengelola

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KODE UAKPB : 099131

TANGGAL : 25-07-2025
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

SLEMAN, 25 JULI 2025
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak
NIP. 197908222005022001



Laporan BPYBDS

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KODE UAKPB : 099131

TANGGAL : 25-07-2025
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

SLEMAN, 25 JULI 2025
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



YUNUS FATHRIYAH, S.E., Ak
NIP. NIP. 197908222005022001



Laporan Penyusutan Intrakomptabel

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 12:03 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

SLEMAN, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak
NIP. 197808222005022001





Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 12:03 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

SLEMAN, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
YUYUN FITRIYAH, S.E., Ak
NIP. 197908222005022001





Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tanggal : 25/07/25 12:04 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

SLEMAN, 25 Juli 2025
Penaanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
FUYUN RITHIRIYAH, S.E., Ak
NIP. 197906222005022001





Laporan CRBMN

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tanggal : 25/07/2025 08.14.33
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

SLEMAN, 25 July 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak
NIP. 197903222005022001



Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Sleman, sebagai salah satu satuan kerja Instansi Pemerintah di bawah Mahkamah Agung yang berperan sebagai Kuasa Pengguna BMN, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Sleman dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
31. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
32. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akural dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sleman yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Peradilan Umum.

LBKP Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun 2025 menyajikan nilai BMN secara menyeluruh, baik yang termasuk kategori intrakomptabel (memenuhi syarat kapitalisasi) maupun ektrakomptabel berdasarkan penggolongan, kodefikasi, dan akun neraca yang diatur dalam peraturan terkait. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung.

C. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna ini disusun dan disajikan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan sebagai seluruh barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah. BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya, BMN ada yang dikategorikan sebagai aset lancar maupun aset tetap.

Pengkategorian ini memiliki peran penting dalam menyajikan nilai BMN secara transparan dan akuntabel dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). BMN digolongkan sebagai aset lancar apabila diharapkan akan segera digunakan atau dijual dalam jangka waktu 12 bulan (1 tahun) sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi syarat ini akan diperlakukan sebagai Persediaan.

Sementara itu, BMN dikategorikan sebagai aset tetap jika memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak ditujukan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun untuk tujuan penggunaan. Aset tetap BMN mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Dengan masa manfaat yang panjang, aset tetap BMN menjadi komponen krusial dalam pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

BMN yang telah diperoleh harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin melalui pelaporan BMN secara berkala dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan yang sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses sistematis ini dikenal sebagai penatausahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.

Penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan

oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sleman ini adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);

12. Catatan Ringkas Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal BMN pada Pengadilan Negeri Sleman.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA Per 30 JUNI 2025

A. Saldo Awal per 01 Januari TA 2025

Nilai saldo awal BMN per 01 Januari 2025 menurut Laporan Posisi Keuangan atau Neraca Pengadilan Negeri Sleman adalah sebesar Rp 5.019.550 (*lima juta sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari nilai persediaan sebesar sebesar Rp 5.019.550 (*lima juta sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 0 (*nol rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

1. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2025 sebesar Rp 4.714.150 (*empat juta seratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 5.019.550 (*lima juta sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), dan total mutasi tambah dari pembelian persediaan selama periode laporan sebesar Rp 22.467.355 (*dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*), total mutasi kurang dari transaksi habis pakai persediaan selama periode laporan sebesar Rp 22.772.755 (*dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Barang Konsumsi	5.019.550	22.467.355	22.772.755	4.714.150
Amunisi	0	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0	0
Jumlah	5.019.550	22.467.355	22.772.755	4.714.150

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

7. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

9. BMN berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebanyak 0 unit, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebesar 0 unit, dan mutasi kurang sebesar 0 unit.

V. BARANG MILIK NEGARA LBKP SEMESTER I TAHUN 2025

A. BMN per akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Neraca Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 4.714.150 (*empat juta seratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah*). Nilai BMN dimaksud merupakan nilai persediaan.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Lancar						
Persediaan	4.714.150		-		4.714.150	
Sub Jumlah	4.714.150		-		4.714.150	
Aset Tetap						
Tanah	-		-		-	
Peralatan dan Mesin	-		-		-	
Gedung dan Bangunan	-		-		-	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-		-		-	
Aset Tetap Lainnya	-		-		-	
Konstruksi dalam Pengerjaan	-		-		-	
Sub Jumlah	-		-		-	
Aset Lainnya						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-		-		-	
Aset tak Berwujud	-		-		-	
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	-		-		-	
Total	4.714.150		-		4.714.150	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Tetap						
Peralatan dan Mesin	-		-		-	
Gedung dan Bangunan	-		-		-	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-		-		-	
Aset Tetap Lainnya	-		-		-	
Aset Lainnya					-	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-		-		-	
Aset tak Berwujud	-		-		-	
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	-		-		-	
Total	-		-		-	

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	4.714.150	4.714.150	-
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	-	-	-
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
Aset tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Total	4.714.150	4.714.150	-

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1. NIHIL

B. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. NIHIL

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Negeri Sleman
Semester I Tahun 2025
Kuasa Pengguna Barang





Laporan PNBP dari BMN

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 099131 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 21/07/25 2:58 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	340,000	160,000	0	160,000	47.06
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	17,240,000	7,670,000	0	7,670,000	44.49
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	53,825,000	22,025,000	0	22,025,000	40.92
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	146,357,000	51,018,500	0	51,018,500	34.86
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	217,762,000	80,873,500	0	80,873,500	37.14
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	217,762,000	80,873,500	0	80,873,500	37.14
	JUMLAH PENDAPATAN	217,762,000	80,873,500	0	80,873,500	37.14



Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
Rincian per sub sub kelompok barang
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025**

UAPB : 005
UAKPB : 099131

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM
Tanggal : 25/07/25 8:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2025	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

SLEMAN, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
WYUN KETHRIYAH, S.E., Ak
NIP. 19790822005022001





Neraca Tingkat Satuan Kerja

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 21/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 21/07/25 2:57 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	18,000,000	0	18,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,052,200,224	0	3,052,200,224	0.00
Persediaan	4,714,150	5,019,550	(305,400)	(6.08)
JUMLAH ASET LANCAR	3,074,914,374	5,019,550	3,069,894,824	61,158.77
JUMLAH ASET	3,074,914,374	5,019,550	3,069,894,824	61,158.77
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,052,200,224	0	3,052,200,224	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	14,820,500	0	14,820,500	0.00
Uang Muka dari KPPN	18,000,000	0	18,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,085,020,724	0	3,085,020,724	
JUMLAH KEWAJIBAN	3,085,020,724	0	3,085,020,724	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(10,106,350)	5,019,550	(15,125,900)	(301.34)
JUMLAH EKUITAS	(10,106,350)	5,019,550	(15,125,900)	(301.34)
JUMLAH EKUITAS	(10,106,350)	5,019,550	(15,125,900)	(301.34)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,074,914,374	5,019,550	3,069,894,824	61,158.77

Keterangan :
FINAL

SLEMAN, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA
KEMASA PENGGUNA ANGGARAN



YUYUN BUDI RIYAH, S.E., Ak
NIP. 197908222005022001



Neraca Percobaan (Basis Akrual)

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 21/07/25 1:09 PM

Tgl Cetak : 21/07/25 2:57 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	18,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	3,052,200,224	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,714,150	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	3,052,200,224
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	14,820,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	18,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	95,018,180
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	80,873,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,663,055
0.0	391111	Ekuitas	0	5,019,550
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	160,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	7,670,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	22,025,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	51,018,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,390,755	0
3.0	521211	Beban Bahan	48,053,625	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,590,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	22,772,755	0
JUMLAH			3,269,595,009	3,269,595,009

Keterangan :

FINAL





Neraca Percobaan (Basis Kas)

LBKP SEMESTER I
T.A. 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
KELAS 1A



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : (099131) PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Tgl Data : 21/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 21/07/25 2:58 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	95,018,180
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	80,873,500	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	160,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	7,670,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	22,025,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	51,018,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,009,955	0
3.0	521211	Belanja Bahan	37,613,925	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,804,300	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,590,000	0
JUMLAH			175,891,680	175,891,680

Keterangan :

FINAL

